

Implementasi Absensi *Online* Terhadap Peningkatan Disiplin Kerja di Sektor Publik : Studi Badan Keuangan Daerah Konawe Selatan

Yesi Riski Sukmawati ^{1*}; Muh. Nasir ²; Wd. Srijuna Ramayana ³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia ; yesiriski@gmail.com

* Correspondence : yesiriski@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi absensi *online* dalam meningkatkan disiplin kerja aparatur sipil Negara pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan Metode wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi absensi *online* dari variabel implementasi dikatakan belum berjalan dengan baik karena masih ada beberapa indikator yang masih lemah, yaitu pada indikator Sumber daya dinilai masih kurang cukup efektif karena pada sarana dan prasarannya masih ada kekurangan seperti pada aplikasi absensi *online* yang masih sering mengalami eror. Indikator disposisi dianggap belum stabil dikarenakan aplikasi ini masih rentan terhadap rujukan seperti titip absen, aplikasi ini juga diharapkan bisa dikembangkan lebih lanjut agar dapat memantau lokasi karyawan dikantor setelah absen kehadiran. Dan indikator Struktur birokrasi belum berjalan cukup efektif dikarenakan belum sesuai dengan SOP yang ada. Sedangkan pada variabel disiplin, indikator yang masih dianggap lemah yaitu pada indikator balas jasa dikarenakan pada penerapan absensi *online* jika ada pegawai ASN yang datang terlambat tetap masuk hadir pada absensi manual sehingga pada pemberian balas jasa tetap diberi 100%. Sanksi hukuman yang belum cukup tegas untuk pegawai yang sudah datang terlambat tetapi masih diberi keterangan hadir diabsensi manual.

Kata kunci : *Absensi Online, Disiplin Kerja, Implementasi*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine how the implementation of *online* attendance in improving the work discipline of State civil apparatus at the Regional Finance and Asset Agency of South Konawe Regency. This research method uses descriptive qualitative research. Data collection techniques using interview, observation and documentation methods. The results of this study indicate that the implementation of *online* attendance from the implementation variable is said to have not gone well because there are still several indicators that are still weak, namely the resource indicator is considered still not effective enough because the facilities and infrastructure still have shortcomings such as the *online* attendance application which still often experiences errors. The disposition indicator is considered unstable because this application is still vulnerable to references such as leaving absences, this application is also expected to be further developed so that it can monitor the location of employees in the office after absenteeism. And the bureaucratic structure indicator has not run effectively enough because it is not in accordance with the existing SOP. Meanwhile, in the discipline variable, the indicator that is still considered weak is the reward indicator because in the implementation of *online* attendance, if there are ASN employees who arrive late, they are still entered as present in the manual attendance so that the reward is still given 100%. Punitive sanctions that are not strict enough for employees who have arrived late but are still given a certificate of attendance in the manual attendance.

Keywords : *Online Attendance, Work Discipline, Implementation*

Pendahuluan

Implementasi absensi *online* dalam meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan langkah strategis yang sejalan dengan upaya reformasi birokrasi di Indonesia. Dengan adanya sistem absensi *online*, ASN diharapkan dapat lebih disiplin dalam menjalankan tugasnya, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penegakan disiplin yang efektif di kalangan ASN sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menggantikan peraturan sebelumnya (Estiyanto, 2024). Sistem absensi *online* memungkinkan pencatatan kehadiran ASN secara real-time, yang dapat meminimalisir kecurangan dan meningkatkan akuntabilitas. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam sistem absensi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data kehadiran (Abudin, 2024; Yusof et al., 2018).

Selain itu, penerapan sistem ini juga mendukung transparansi dalam pengelolaan sumber daya manusia, yang merupakan salah satu pilar penting dalam reformasi birokrasi (Utama, 2020). Dengan adanya data kehadiran yang akurat, pimpinan dapat lebih mudah melakukan evaluasi kinerja ASN dan menerapkan sistem *reward and punishment* yang adil (Estiyanto, 2024; Adiwilaga, 2019). Lebih jauh lagi, implementasi absensi *online* juga berkontribusi pada peningkatan motivasi ASN. Ketika ASN merasa bahwa kehadiran mereka dicatat secara adil dan transparan, mereka cenderung lebih termotivasi untuk bekerja dengan baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa disiplin kerja dan motivasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik (Darmawan, 2022). Dengan demikian, sistem absensi *online* tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong budaya kerja yang lebih baik di lingkungan pemerintahan.

Penggunaan aplikasi absensi *online* di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) telah berjalan sejak tahun 2022 dan berlaku sampai sekarang. Setiap pegawai wajib melakukan absen dengan batas waktu dan lokasi yang telah ditentukan yaitu paling lambat pukul 08.00 WITA pada saat jam masuk kantor dan pada saat pulang kantor pada pukul 16.00 WITA. Dengan diterapkannya absensi *online* ini diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan pegawai negeri sipil dalam hal kedisiplinan waktu. Dengan adanya absensi *online* ini mampu memberikan perubahan pada sistem birokrasi Indonesia ke arah yang lebih baik, dengan harapan pemanfaatan teknologi yang semakin banyak dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Karena pemanfaatan teknologi absensi *online* yang dinilai dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan akurasi dalam mencatat waktu kerja pegawai baik waktu datang maupun waktu pulang. Selain itu, laporan absensi yang akurat sangat membantu pemerintah dalam hal memberikan kompensasi kepada pegawai. Dengan demikian akan mengurangi kerugian yang diperoleh oleh pemerintah dalam hal pemberian kompensasi kepada pegawai negeri sipil dan akan membuat pegawai jera dengan kedisiplinan dengan cara menerima sanksi pemotongan kompensasi sesuai dengan waktu keterlambatannya.

Pada penerapan absensi *online* di Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Konawe Selatan masih kurang efisien, karena pada penerapannya masih ada beberapa pegawai yang belum bisa beradaptasi menggunakan absensi *online* ini, selain itu dalam pelaksanaannya terdapat kendala seperti pada masalah dari server absensi *online* yang jika diakses secara bersamaan server akan lambat dalam menjalankan proses, pada saat

mengabsen kita juga harus mendapat titik koordinat nya agar bisa mengabsen, bila ada gangguan dan absen *online* tidak bisa terbuka berarti kita tidak bisa mengabsen pada pagi hari dan pada saat absen pulang melalui absensi *online*, absensi *online* ini juga sering mengalami kendala seperti sinyal internet yang terkadang kurang memadai mengakibatkan pegawai tidak dapat mengisi kehadirannya lewat absensi *online*. Menurut hasil wawancara dengan kepala sub. bagian kepegawaian, dikantor Badan Keuangan Aset dan Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Disebutkan bahwa masih ada beberapa pegawai yang belum bisa menggunakan aplikasi dari absensi *online* ini, absensi ini juga tidak dapat digunakan ketika hilang jaringan. Selain itu, absensi ini juga tidak dapat mendeteksi apakah pegawai yang sudah absen masih berada di sekitar kantor atau sudah pergi keluar, hal itu bisa saja menyebabkan manipulasi dalam absen misalnya pegawai datang pagi hanya untuk absen agar tidak terlihat terlambat tetapi sehabis itu bisa saja pegawai pergi keluar kantor dan bukan langsung melakukan pekerjaannya.

Implementasi absensi *online* dalam meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan topik yang semakin relevan dalam konteks modernisasi administrasi publik. Dengan kemajuan teknologi informasi, sistem absensi berbasis digital menawarkan solusi yang lebih efisien dan akurat dibandingkan dengan metode manual. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem absensi yang efektif dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan disiplin kerja pegawai. Misalnya, penelitian oleh Maulidya et al. menunjukkan bahwa implementasi sistem absensi *fingerprint*, sanksi, dan motivasi secara simultan berpengaruh positif terhadap disiplin kerja karyawan (Maulidya et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa teknologi dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kedisiplinan melalui pengawasan yang lebih ketat. Lebih lanjut, penelitian oleh Juniar mengungkapkan bahwa efektivitas aplikasi *Human Resources Management System* (HRMS) dalam manajemen absensi dapat meningkatkan disiplin karyawan di PT. Thai Seng Indonesia (Juniar, 2023). Dengan menggunakan metode *Technology Acceptance Model* (TAM), penelitian ini menegaskan bahwa penerimaan teknologi oleh pegawai sangat penting untuk keberhasilan implementasi sistem absensi *online*.

Selain itu, pentingnya lingkungan kerja dan komitmen organisasi dalam mendukung kinerja karyawan, yang pada gilirannya dapat dipengaruhi oleh sistem absensi yang efisien (Burhannudin et al., 2019). Sistem absensi *online* tidak hanya meningkatkan akurasi data kehadiran, tetapi juga memfasilitasi pengawasan yang lebih baik. Penelitian oleh Saied menunjukkan bahwa desain dan implementasi sistem absensi berbasis teknologi terkini dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan kehadiran karyawan (Saied, 2023). Dengan sistem yang terintegrasi, manajemen dapat dengan mudah memantau kehadiran pegawai secara real-time, yang berpotensi mengurangi tingkat ketidakhadiran dan meningkatkan disiplin. Selain itu, penggunaan teknologi RFID dalam sistem manajemen absensi dapat mengatasi masalah yang sering terjadi pada sistem manual, seperti penipuan dan kehilangan data (Hidayat et al., 2023). Dengan demikian, penerapan teknologi dalam absensi *online* tidak hanya meningkatkan disiplin, tetapi juga memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada dalam pengelolaan kehadiran pegawai.

Dari tinjauan literatur yang ada, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang implementasi absensi *online* untuk meningkatkan disiplin kerja ASN, namun masih sedikit yang fokus pada pengaruh langsung dari faktor-faktor seperti sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi pada efektivitas implementasi dalam konteks yang spesifik

seperti di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Selain itu, literatur yang ada lebih banyak membahas implementasi secara umum tanpa mengeksplorasi secara mendalam masalah-masalah teknis dan adaptasi pengguna yang sering terjadi di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara mendalam bagaimana faktor-faktor sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi mempengaruhi keberhasilan implementasi absensi *online* di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Melalui metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menggali persepsi dan pengalaman pengguna serta pengelola sistem dalam menghadapi kendala teknis dan adaptasi dengan sistem absensi baru. Penulis menggunakan konsep dari Edwards III (1984), dalam menganalisis implementasi absensi *online* melalui empat faktor yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi.

Kontribusi dari penelitian ini terhadap literatur yang ada adalah memberikan wawasan yang lebih konkret dan aplikatif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi absensi *online* di sektor publik, khususnya dalam konteks birokrasi pemerintah daerah di Indonesia. Temuan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan untuk merancang dan menerapkan teknologi informasi dalam administrasi publik yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan dan kondisi pengguna di lapangan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji Implementasi Absensi *Online* dan pengaruhnya terhadap Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian ini berfokus pada proses dan makna di balik implementasi teknologi tersebut tanpa melakukan perbandingan dengan variabel lain, sehingga memungkinkan penelitian untuk menggali informasi yang mendalam secara objektif.

Lokasi penelitian ini berada di kantor BKAD Kabupaten Konawe Selatan, dipilih karena adanya beberapa kendala dalam penerapan absensi *online* seperti masalah server dan sinyal internet yang tidak memadai, yang mengakibatkan beberapa pegawai belum bisa beradaptasi dengan sistem ini. Hal ini menarik perhatian untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Informan penelitian ini meliputi Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian serta empat Pegawai Negeri Sipil yang terlibat langsung dalam penggunaan sistem absensi *online* tersebut. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, dimana informan dipilih berdasarkan pengetahuan dan pengalaman langsung mereka dengan masalah yang diteliti. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan respons langsung dari informan mengenai pengalaman mereka dengan sistem absensi *online*. Observasi memungkinkan peneliti untuk melihat langsung bagaimana sistem tersebut diimplementasikan dan dokumentasi melibatkan pengumpulan data terkait dari dokumen yang ada di kantor BKAD.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Dj.B, 2024). Pendekatan ini memungkinkan penggalian data secara mendalam untuk memahami berbagai aspek implementasi absensi *online* dan dampaknya terhadap disiplin kerja di BKAD Kabupaten Konawe Selatan.

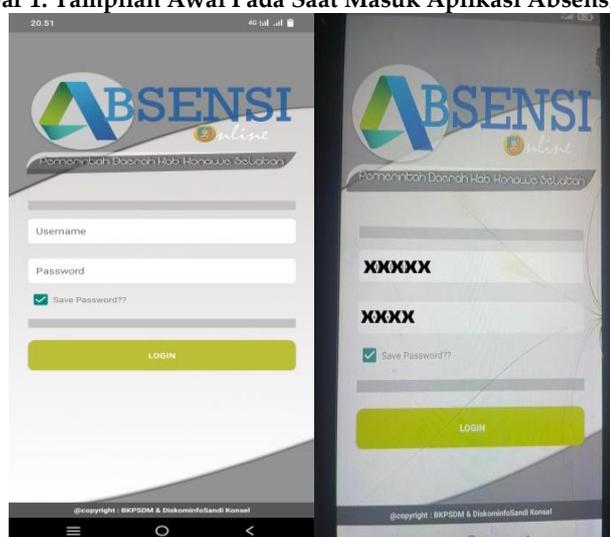
Hasil dan Pembahasan

Implementasi Absensi *Online* di Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Konawe Selatan

Implementasi merupakan salah satu ukuran keberhasilan dalam suatu hal. Suatu kegiatan operasional dapat dinilai berhasil jika suatu kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh suatu organisasi. Adapun implementasi absensi *online* disini ialah berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam penerapan sistem ini pada suatu lembaga atau organisasi.

Tujuan implementasi adalah untuk memastikan bahwa sebuah komponen bekerja sesuai rencana dan memberikan hasil yang diharapkan. Proses ini memerlukan komunikasi yang jelas, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan yang mungkin terjadi selama implementasi.

Gambar 1. Tampilan Awal Pada Saat Masuk Aplikasi Absensi *Online*



(Sumber Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024)

Pada gambar 1 di atas dapat dilihat bahwa pada saat kita ingin masuk mengabsen menggunakan absen *online*, para pegawai terlebih dahulu memasukkan nama mereka untuk *username* dan *password* yang mereka buat sendiri. Setelah pegawai masuk mengabsen kemudian akan ada beberapa pilihan menu untuk absen, diantaranya ada absen kehadiran untuk absen pada saat jam masuk pagi dan absen pulang, absen untuk mengikuti apel, absen darurat (digunakan pada saat pegawai ASN mendampingi kepala badan atau sekretaris untuk melakukan pekerjaan atau pada saat keadaan darurat lainnya), dan menu izin di dalam menu ini terdapat pilihan izin seperti izin sakit perjalanan dinas dan cuti melahirkan.

Dalam penerapan suatu program di suatu lembaga dengan efektif, maka dapat diperhatikan pula beberapa faktor program yang harus dipenuhi oleh para pengguna program. Adapun faktor-faktor tersebut yaitu faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi, dan faktor struktur birokrasi. Berikut penjelasan tentang aspek-aspek implementasi absensi *online* pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagai berikut.

1. Komunikasi

Komunikasi yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Komunikasi merupakan proses pengiriman dan penerimaan informasi sehingga saling memahami. Komunikasi menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan implementasi suatu kebijakan karena antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan harus memiliki informasi yang sama yaitu dalam hal tata cara pelaksanaan suatu kebijakan yang telah dibuat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka ditemukan bahwa Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan sudah mampu memanfaatkan program absensi *online* sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan ditetapkannya absensi ini. Program ini mempunyai tujuan yang jelas yaitu untuk mempermudah merekap data kehadiran pegawai secara *online*. dalam penggunaan absensi ini, diketahui bahwa pegawai bisa hadir tepat waktu sebelum jam kantor dimulai dan pulang sesuai dengan jam pulang kantor, yang mana ini menunjukkan peningkatan disiplin kerja maupun kehadiran para pegawai.

Komunikasi memiliki bagian di dalamnya yaitu meliputi transmisi, dan kejelasan. Transmisi merupakan pelaksana kebijakan yang memahami informasi yang disampaikan oleh pembuat kebijakan dalam melaksanakan kebijakan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang menjadi target dari transmisi ini adalah kelompok sasaran kebijakan atau pihak yang terkait. Cara yang digunakan untuk menyampaikan kebijakan terkait penerapan absensi *online* yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh kasubag umum/kepegawaian di SKPD dan admin yang telah ditunjuk sebagai verifikator absen di masing-masing SKPD yang ada di Kabupaten Konawe Selatan sebagai pelaksana kebijakan tersebut.

Kegiatan sosialisasi mengenai penerapan absensi *online* dilakukan di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dikabupaten Konawe Selatan. Kejelasan dalam penyampaian kebijakan yaitu pada saat pelaksana kebijakan dapat mengerti tata cara pelaksanaan satu kebijakan, dalam hal ini berarti kejelasan dalam tata cara pelaksanaan pengisian absensi *online* berbasis android. Apabila kejelasan tercapai, maka penggunaan absensi ini akan berjalan dengan lancar dan juga dapat meminimalisir masalah kedepannya.

Gambar 2. Sosialisasi Tentang Cara Penggunaan Aplikasi Absensi Online



(sumber: badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024)

Kegiatan sosialisasi tentang pemakaian absensi *online* diikuti oleh masing-masing kasubag umum dan kepegawaian selaku perwakilan dari masing-masing instansi yang ada dilingkup Kabupaten Konawe Selatan. Dimana para pegawai tersebut diberikan tata cara penggunaan aplikasi absensi *online* dan tentang fitur-fitur apa saja yang ada didalam aplikasi tersebut.

Menurut penjelasan dari (Sukmawati) selaku staf dibagian umum dan kepegawaian BKAD Konawe Selatan tentang sosialisasi penggunaan absensi *online*. Beliau mengatakan bahwa :

“sosialisasi penggunaan absensi online yaitu cara penggunaan absensi online kita diberi tahu oleh ibu kasubag selaku admin absensi online di BKAD kabupaten Konawe Selatan, kami diberi tahu tata cara penggunaan aplikasi absensi online dan kegunaan fitur-fitur yang ada didalam aplikasi tersebut”.

Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa cara penggunaan absensi *online* di BKAD Kabupaten Konawe Selatan untuk para pegawai ASN diberi arahan oleh ibu kasubag Umum dan Kepegawaian sebagai admin Absensi Online di BKAD Kabupaten Konawe Selatan, beliau menjelaskan terkait bagaimana cara penggunaan absensi *online* dan fitur-fitur apa saja yang ada di dalam aplikasi tersebut. Oleh karena itu penulis melanjutkan wawancara kepada ibu kasubag umum dan kepegawaian terkait tentang peralihan absensi *online*. Beliau mengatakan bahwa :

“pada saat akan peralihan dari absensi sidik jari ke absensi online untuk penerapannya disampaikan melalui surat edaran setelah itu sebelum peralihan diadakan terlebih dahulu sosialisasi peralihan dari absensi sidik jari ke absensi online dan bagaimana cara penggunaannya serta fitur-fitur yang ada didalam aplikasi apa saja kegunaan dari fitur-fitur tersebut. Di dalam aplikasi ini terdapat fitur izin (Izin perjalanan dinas, izin melahirkan dan izin sakit), dan absen mengikuti apel serta batas jam absen masuk dan jam pulang”. (wawancara dengan ibu Nina Masriani).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa penggunaan absensi *online* di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan mengenai penerapannya disampaikan melalui surat edaran dan diadakannya sosialisasi penggunaan absensi *online* ini.

Berdasarkan pengamatan peneliti, dapat disimpulkan bahwa penggunaan absensi *online* di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan pada saat akan peralihan dari absensi sidik jari ke absensi *online* dilakukan terlebih dahulu proses sosialisasi tentang cara-cara bagaimana menggunakan aplikasi tersebut untuk mengabsen serta fitur-fitur apa saja yang ada di dalam aplikasi absensi *online*.

2. Sumber Daya

Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

Implementasi dapat berhasil apabila salah satu faktor yang penting didalamnya terpenuhi yaitu faktor sumberdaya. Pada faktor ini, kemampuan pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan suatu program atau kebijakan adalah yang menjadi tolak ukur pada faktor ini. Beberapa indikator dalam aspek sumber daya yaitu terdiri dari staf, wewenang, informasi, dan fasilitas. Unsur dalam implementasi kebijakan adalah pelaksana kebijakan itu sendiri. Pelaksana kebijakan pada penerapan absensi *online* ini adalah staf atau ASN pada suatu OPD. Pada penelitian ini berfokus pada staf yang berstatus ASN yang ada di Badan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe selatan sebagai pengguna aplikasi absensi

online yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Pegawai yang ada di kepegawaian berjumlah 14 orang yang terdiri dari 7 laki-laki dan 7 perempuan.

Menurut kasubag umum dan kepegawaian BKAD Konawe Selatan (ibu Nina Masliani) dalam wawancara peneliti beliau menjelaskan bahwa :

“pada waktu absensi online ini pertama kali digunakan masih banyak pegawai yang tidak bisa menggunakan aplikasi ini terutama pegawai yang sudah sedikit berumur karena mungkin faktor usia jadi agak sedikit susah untuk mengerti tata cara penggunaannya. Kalau sekarang semuanya sudah bisa mengabsen menggunakan absensi online.”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk absensi *online* berbasis aplikasi dikantor BKAD di Kabupaten Konawe Selatan pada awal saat absensi *online* ini diperkenalkan, banyak pegawai terutama yang sudah berumur menghadapi kesulitan dalam menggunakan aplikasi tersebut. Namun, sekarang semua pegawai dapat mengabsen secara *online*, ini menunjukkan adaptabilitas mereka terhadap perkembangan teknologi baru.

Penerapan aplikasi absensi *online* diberbagai instansi pemerintahan menjadi hal yang umum dalam upaya modernisasi dan efisiensi operasional. Namun, meskipun teknologi ini menawarkan banyak keuntungan seperti kemudahan akses dalam proses absensi, aplikasi absensi *online* sering kali menghadapi berbagai masalah teknis yang mempengaruhi efektifitas. Salah satu isu utama yang sering ditemui adalah eror sistem yang berulang, yang dapat mengganggu proses absensi harian. Penyebab dari masalah ini bisa bermacam-macam, mulai dari titik koordinat yang sering berubah, dan keterbatasan kapasitas server. Aplikasi absensi *online* memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi operasional, masalah teknis yang masih sering terjadi menunjukkan perlunya peningkatan dalam sumberdaya terkait agar penerapan teknologi ini bisa berjalan lebih lancar dan efisien.

Seperti yang dikatakan oleh sumarin selaku staf dikantor Badan Kepegawaian Dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan, bahwa :

“untuk penerapan absensi online memang memudahkan para pegawai ASN untuk mengabsen tetapi absensi ini masih sering eror dan tidak dapat digunakan untuk mengabsen, sehingga kami disini masih menggunakan juga absen manual.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun dalam penerapannya absensi *online* memberikan kemudahan bagi para pegawai ASN dalam melakukan absensi, kendala teknis yang sering terjadi membuat sistem ini belum sepenuhnya dapat diandalkan. Akibatnya, kantor BKAD masih menggunakan absensi manual karna masih diperlukan sebagai solusi alternatif untuk memastikan keakuratan dan kelancaran proses absensi.

Sedangkan dalam hal pemberian wewenang dan informasi terkait absensi *online* juga sangat penting bagi penerapan absensi *online* di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan, untuk itu peneliti mewawancarai kasubag umum dan kepegawaian BKAD Kabupaten Konawe Selatan (Nina Masliani) selaku admin absensi *online* dikantor BKAD Konawe Selatan, beliau mengatakan bahwa :

“para pegawai disini sudah melakukan kewajibannya semaksimal mungkin, sehingga absensinya setiap bulan selalu bagus. Setiap ada pegawai yang tidak hadir atau izin saya pasti tau karena saya sebagai admin absensi online di BKAD Kabupaten Konawe Selatan, begitupun tentang informasi ataupun masalah yang ada terkait absensi online saya sebagai admin pasti akan menginformasikan kepada pegawai lainnya ataupun sekedar mengingatkan mereka untuk tidak lupa absen di absensi online pada saat masuk kantor maupun pulang kantor agar pada saat rekap absensi pada akhir bulan, absensi mereka tidak bermasalah.”

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, admin absensi *online* di BKAD Kabupaten Konawe Selatan selalu menginformasikan tentang adanya informasi-informasi terbaru ataupun masalah pada absensi *online* kepada para pegawai ASN di BKAD Kabupaten Konawe Selatan, admin juga sering mengingatkan agar pegawai tidak lupa untuk mengabsen pada jam masuk maupun pulang untuk mencegah adanya masalah terkait hasil rekapan akhir bulan para pegawai ASN di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Selain tentang sumberdaya manusia atau staf ASN, wewenang dan informasi, sumberdaya lainnya sebagai pendukung tercapainya implementasi yaitu dengan adanya fasilitas yang ada terkait dari penerapan absensi *online* di BKAD Kabupaten Konawe Selatan. Fasilitas merupakan salah satu indikator dalam sumber daya yang juga berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan. Indikator ini juga seharusnya dipenuhi karena jika tidak maka akan menghambat implementasi suatu program. Fasilitas menyangkut dengan ketersediaan fasilitas untuk mendukung implementasi absensi sistem *online* ini, misalnya fasilitas wifi gratis di setiap instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Konawe Selatan. Seperti yang dikatakan oleh Sukmawati selaku staf di bagian umum dan kepegawaian Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Beliau mengungkapkan bahwa :

"absensi online jika kita akan mengabsen kita harus login terlebih dahulu dan harus menggunakan kuota jadi kantor menyediakan wifi gratis untuk para pegawai agar mempermudah proses pada saat absen maupun untuk menunjang kegiatan lainnya."

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dari penerapan Absensi *Online* di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Konawe Selatan menggunakan jaringan dan kuota jadi untuk penerapannya agar lebih efektif BKAD Kabupaten Konawe Selatan menyiapkan *wifi* sebagai penunjang para pegawai untuk memudahkan mereka mengabsen maupun memudahkan dalam kegiatan lainnya.

Dari deskripsi diatas tentang sumberdaya manusia dan fasilitas yang ada terkait dari adanya penerapan absensi *online* di Badan Kepegawaian dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Konawe Selatan dapat disimpulkan bahwa, Pada pemberian wewenang dinilai sudah baik karena setiap staf atau yang bertindak sebagai admin mampu memahami dan melaksanakan wewenangnya yaitu sebagai perantara pegawai lainnya saat absen dan juga mengecek absensi pegawai lainnya dalam jangkauannya masing-masing, dan admin mengingatkan apabila ada pegawai yang lupa absen baik saat datang ke kantor maupun pulang. Dalam aspek sumberdaya, informasi merupakan hal yang diperlukan sebagai pedoman untuk melaksanakan suatu kebijakan oleh pelaksana kebijakan sehingga dapat sesuai dengan ketentuan. Para pegawai juga dapat mengakses koneksi internet dengan menggunakan *wifi* gratis yang terdapat di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Konawe Selatan. Hal ini difasilitasi guna mempermudah pekerjaan yang membutuhkan koneksi internet. Jadi, untuk fasilitas internet sudah ada jadi dapat membantu meringankan pekerjaan yang ada di setiap OPD. Namun dalam penerapan absensi *online* berbasis aplikasi dikantor BKAD masih sering mengalami eror sistem yang dapat mempengaruhi efektifitas.

3. Disposisi

Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, dan kejujuran. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif .

Disposisi juga merupakan sikap dari seorang pelaksana kebijakan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Kemungkinan kebijakan akan berjalan dengan lancar dapat dilihat dari penerimaan pelaksana kebijakan, apabila diterima dengan baik maka kebijakan juga akan dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh. Disposisi berkaitan dengan kecenderungan pelaksana, keinginan dan juga kemauan untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh sehingga tujuan dapat diwujudkan.

Seperti yang dijelaskan oleh Nina Masriani selaku kasubag umum dan kepegawaian Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan, bahwa :

“para pegawai ASN disini sudah menjalankan tupoksinya sebagaimana mestinya, dari mulai datang pagi mengabsen sampai dengan absen pulang, terlebih pada saat absensi ini mulai diterapkan dikantor. Absensi ini juga tidak bisa dimanipulasi misalnya jika ada pegawai yang datang terlambat maka diabsensi keterangannya alpa. Untuk itu para pegawai harus berusaha datang sebelum batas jam absen pagi.”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa para pegawai dikantor BKAD Kabupaten Konawe Selatan sudah menjalankan tupoksinya masing-masing sesuai arahan dari pemerintah mengenai batas waktu absen pagi dan absen pada sore hari.

Sementara itu, dalam pemakaian absensi *online* berbasis aplikasi ini terkait dengan info bisa digunakan oleh lebih dari satu pengguna asalkan pengguna mengetahui *username* dan *password* masing-masing. Hal ini membawa keuntungan dan resiko tertentu, misalnya kemudahan ini dapat mempermudah proses absensi, terutama di lingkungan kerja misalnya pada situasi darurat dimana pegawai tidak dapat membawa perangkat mereka sendiri. Sedangkan resiko lainnya hal ini dapat menyebabkan manipulasi data absensi. Jika seseorang mengetahui *username* dan *password* pegawai lain, mereka dapat dengan mudah melakukan *chek-in* dan *chek-out* atas nama orang tersebut tanpa kehadiran fisik yang sebenarnya, yang dapat menyebabkan data kehadiran tidak akurat, hal ini juga dapat merusak integritas sistem absensi dan menimbulkan keraguan terhadap akurasi data yang dikumpulkan. Seperti yang diungkapkan oleh Sumarlin selaku staf di Badan Kepegawaian dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan, beliau mengatakan bahwa :

“saya lebih menyukai mengabsen menggunakan absensi sidik jari untuk tingkat kedisiplinannya tetapi jeleknya absensi sidik jari kalau mesinnya sedang rusak itu lama lagi perbaikannya dan membutuhkan biaya tambahan. Sedangkan untuk absensi online berbasis aplikasi ini memang memudahkan para pegawai ASN untuk mengabsen tetapi untuk absensi ini menurut saya jeleknya dalam satu hp itu bisa dipakai untuk mengabsen oleh pegawai lainnya asal kita tau username dan password akun absensi mereka, jadi pegawai yang masih di rumah bisa saja titip absen kepada pegawai yang sudah datang. Bukan hanya itu mungkin absensi ini bisa lebih dikembangkan agar bisa menganalisa para pegawai ASN yang sudah absen itu mereka masih ada dikantor untuk melanjutkan pekerjaannya atau mereka hanya datang ke kantor untuk mengabsen lalu pulang, kesian pegawai yang rajin datang pagi untuk mengabsen dan masuk kerja sesuai jamnya sedangkan yang lain berbeda.”

Dari hasil penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, absen menggunakan sidik jari memiliki tingkat kedisiplinan yang cukup tinggi tetapi di sisi lain jika mesin absen ini rusak kantor memerlukan waktu yang cukup lama untuk perbaikan dan biaya tambahan. Sedangkan absensi *online* berbasis aplikasi memudahkan para pegawai ASN untuk melakukan absensi, tetapi sering mengalami eror dan rawan terjadi rujukan seperti titip absen. Absensi ini juga perlu dikembangkan lanjut agar dapat memantau keberadaan pegawai dikantor setelah absen, untuk memastikan keadilan bagi para pegawai.

Sedangkan untuk kejujuran para pegawai ASN yang memakai satu hp untuk login dan mengabsen menggunakan hp orang lain, hal ini bisa saja menyebabkan para pegawai ASN untuk diabsenkan oleh ASN lain yang sudah berada dikantor maka penulis melanjutkan wawancara kepada Nina Masriani selaku admin absensi *online* dan kasubag umum kepegawaian BKAD Kabupaten Konawe Selatan, beliau mengatakan bahwa :

“Disini saya lihat tidak ada pegawai yang berbuat seperti itu, malah disini kami terkadang merasa kekurangan jam kerja karena terlalu banyaknya pekerjaan yang kami kerjakan jadi para pegawai itu mereka harus berangkat sesuai waktu yang ditetapkan agar pekerjaan mereka berjalan dengan baik dan selesai tepat waktu.”

Dalam wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, para pegawai ASN yang ada dikantor BKAD tidak ada yang berperilaku demikian, karena begitu banyaknya pekerjaan yang ada dikantor BKAD para ASN harus hadir sesuai jadwal yang ditetapkan agar semua tugas dapat diselesaikan dengan tepat waktu

Hal senada juga diungkapkan oleh Sumarlin selaku staf di BKAD Kabupaten Konawe Selatan, bahwa :

“Kalau dikantor BKAD ini tidak ada yang seperti itu karena memang disini banyak sekali pekerjaan yang harus dikerjakan setiap harinya jadi kita sebagai pegawai harus datang pagi-pagi ke kantor dan bekerja.”

Dari penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan karena banyaknya pekerjaan yang ada dikantor membuat para pegawai ASN harus datang tepat waktu agar pekerjaan mereka bisa selesai dengan baik dan tepat pada waktunya.

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa para pegawai dikantor BKAD Kabupaten Konawe Selatan telah menjalankan tugas mereka sesuai arahan pemerintah mengenai batas waktu absen pagi dan sore hari. Dalam wawancara juga, tidak ditemukan pegawai ASN yang berperilaku tidak disiplin. Kehadiran tepat waktu menjadi kunci penting karena beban kerja yang tinggi tersebut membuat para pegawai ASN harus hadir sesuai jadwal untuk menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu, hal tersebut menunjukkan dedikasi mereka terhadap pekerjaan. Sedangkan untuk penerapan absensi *online* berbasis aplikasi lebih mudah digunakan bagi para pegawai ASN, tetapi aplikasi ini masih rentan terhadap rujukan seperti titip absen, aplikasi ini juga diharapkan bisa dikembangkan lebih lanjut agar dapat memantau lokasi karyawan dikantor setelah absen kehadiran.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standar Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang begitu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni procedure birokrasi yang rumit dan kompleks yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Standar operational procedure (SOP) untuk absensi *online* berbasis aplikasi mencakup langkah-langkah yang harus diikuti oleh karyawan dan manajemen untuk memastikan proses absensi berjalan dengan lancar dan akurat. SOP absensi *online* berbasis aplikasi di Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Konawe selatan dirancang untuk memastikan kehadiran karyawan tercatat secara akurat dan efisien. Setiap pegawai ASN di BKAD diharuskan memiliki aplikasi absensi Konsel pada perangkat mereka, pegawai melakukan absen menggunakan absensi *online* berbasis aplikasi pada saat mulai dan selesai bekerja, memastikan fitur GPS aktif untuk validasi lokasi, data absensi juga dapat diakses di

bagian kepegawaian untuk monitoring kehadiran dan keperluan administrasi lainnya. Pelanggaran terhadap *procedure* absensi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

Menurut Kasubag umum dan kepegawaian BKAD Konawe Selatan (Nina Masriani) dalam wawancara beliau mengatakan bahwa :

"waktu absen pagi itu dari jam 07.00 WITA sampai jam 08.00 WITA dan absen pulang jam 16.00 WITA. Kalo kita terlambat datang atau absen diatas jam 08.00 WITA itu masuknya alpa diabsensi online. Tetapi kan kita lihat lagi kalo diabsensi online alpa tetapi orangnya ada dikantor masuk bekerja itu diabsen manual berarti hadir. Kita disini juga masih dikasi absen manual sebagai pendamping absensi online."

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa absen dimulai pada pagi hari dimulai dari jam 07.00 WITA sampai dengan jam 08.00 WITA dan absen pulang pada sore hari jam 16.00 WITA, jika pegawai alpa diabsensi *online* tetapi sebenarnya hadir dan bekerja dikantor, maka kehadiran tersebut akan dicatat secara manual sebagai hadir. Oleh karena itu, para pegawai ASN juga masih menggunakan absen manual sebagai pendamping absensi *online* untuk memastikan keakuratan data kehadiran.

Berikut ini adalah tabel waktu mulai absensi hadir dan absensi pulang dikantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 2. Waktu Dimulai Absensi Hadir Dan Absensi Pulang

Hari	Waktu	
Senin-Jum'at	Absensi Pagi	07.00-08.00
	Absensi Sore	16.00
Sabtu-Minggu	Libur	

Sumber: Badan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024

Sistem absensi bagi para ASN kini telah diperketat dengan penggunaan teknologi *online* untuk memastikan disiplin dan kehadiran yang akurat. Pegawai diwajibkan untuk melakukan absensi pagi antara pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 08.00 WITA. jika pegawai terlambat mengabsen lebih dari 1 menit maka akan ada konsekuensi yang diterapkan berdasarkan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPPNS) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan, pemotongan Tambahan Penghasilan pegawai tersebut tergambar dibawah ini.

Tabel 3. Pengurangan TPPNS pada pegawai yang terlambat masuk kerja.

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Presentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
TL 4	>91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

Sumber : Badan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024

Tabel 3 di atas menjelaskan pemotongan balas jasa terhadap para pegawai ASN jika pegawai tersebut terlambat hadir. Selain itu, akan ada juga pemotongan terhadap pegawai yang pulang sebelum pada waktunya tergambar melalui pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. Pengurangan TPPNS Pegawai Yang Pulang Sebelum Waktunya.

Pulang sebelum pada waktunya (PSW)	Lama meninggalkan pekerjaan sebelum pada waktunya	Presentase pengurangan
PSW 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25 %
PSW 4	91> 91 menit dan atau tidak daftar hadir masuk kerja	1,55 %

Sumber: Badan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024.

Tabel 4 diatas menjelaskan tentang pemotongan balas jasa terhadap pegawai ASN yang pulang sebelum pada waktunya. Sedangkan pada pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel pada senin pagi dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPPNS sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja, dan pegawai yang tidak membuat laporan kinerja pegawai dikenakan pengurangan TPPNS sebesar 60% (enam puluh persen) pada bulan yang bersangkutan.

Sedangkan pada pegawai ASN yang melakukan absensi lebih dari jam 16.00 WITA maka mereka dihitung sebagai bekerja lembur. Namun perlu diperhatikan bahwa sistem absensi ini hanya akan menerima catatan hingga pukul 00.00 WITA. Dengan adanya aturan yang ketat ini, diharapkan para pegawai ASN dapat lebih disiplin dalam mematuhi jam kerja dan menghindari kecurangan dalam pencatatan kehadiran. Dari hasil diatas juga dapat disimpulkan bahwa, untuk struktur birokrasi belum berjalan maksimal karena belum sesuai dengan SOP, seharusnya pegawai yang datang terlambat dan keterangan diabsen *online* sudah dianggap tidak masuk maka TPP dipotong sesuai dari SOP nya.

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi absensi *online* di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan belum berjalan secara efektif, yang dikaitkan dengan beberapa faktor seperti sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari sisi sumber daya, kendala teknis seperti eror aplikasi dan kurangnya infrastruktur pendukung menjadi masalah utama. Ini sesuai dengan temuan oleh Yusof et al. (2018) yang menggarisbawahi pentingnya infrastruktur teknologi yang memadai dalam penerapan sistem absensi *online*. Namun, dalam konteks penelitian ini, masalah sumber daya lebih jauh memperlihatkan bahwa tanpa dukungan infrastruktur yang kuat, keandalan dan efektivitas sistem absensi *online* tidak dapat terjamin.

Dalam hal disposisi, penelitian ini menunjukkan bahwa ada keengganan dan ketidakkonsistenan dalam menggunakan sistem absensi *online*. Ini menunjukkan bahwa meskipun adanya kebijakan dan alat, tanpa disposisi yang positif dari pengguna, implementasi teknologi akan menghadapi hambatan. Fenomena ini mirip dengan temuan Darmawan (2022), yang menyatakan bahwa motivasi dan persepsi positif terhadap teknologi merupakan faktor krusial dalam mendorong disiplin kerja melalui sistem absensi *online*.

Struktur birokrasi juga memainkan peran penting. SOP yang tidak jelas dan kurangnya pelatihan tentang penggunaan sistem absensi *online* mencerminkan temuan Burhannudin et al. (2019), yang menekankan pentingnya struktur organisasi yang mendukung dalam implementasi kebijakan publik. Penelitian ini menambahkan bahwa ketidakjelasan dalam SOP dan pelatihan yang tidak memadai dapat menurunkan efektivitas dan akurasi data absensi, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas sistem dalam mendorong disiplin kerja.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, dari hasil wawancara maka penulis memberikan kesimpulan bahwa pada penerapan absensi *online* di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Konawe Selatan masih belum cukup efektif dikarenakan masih ada beberapa indikator yang masih lemah seperti pada variabel implementasi indikator yang lemah yaitu. Pertama, Sumber daya dinilai masih kurang cukup efektif karena pada sarana dan prasarannya masih ada kekurangan seperti pada aplikasi absensi *online* yang masih sering mengalami eror. Kedua, faktor disposisi dianggap belum stabil dikarenakan aplikasi ini masih rentan terhadap rujukan seperti titip absen, aplikasi ini juga diharapkan bisa dikembangkan lebih lanjut agar dapat memantau lokasi karyawan dikantor setelah absen kehadiran. Ketiga, struktur birokrasi belum berjalan cukup efektif karena untuk struktur birokrasi belum berjalan maksimal karena belum sesuai dengan SOP, seharusnya pegawai yang datang terlambat dan keterangan diabsen *online* sudah dianggap tidak masuk maka TPP dipotong sesuai dari SOP nya.

Implikasi dari temuan ini sangat relevan untuk pengembangan kebijakan dan praktek manajemen di sektor publik. Pertama, diperlukan peningkatan infrastruktur teknologi untuk mendukung keandalan sistem absensi *online*. Pemerintah atau instansi terkait harus berinvestasi dalam teknologi yang stabil dan pelatihan pengguna yang efektif untuk memastikan bahwa sistem ini dapat dioperasikan dengan lancar oleh semua pegawai. Kedua, perlu adanya upaya untuk meningkatkan disposisi positif pengguna terhadap teknologi. Ini bisa melalui kampanye internal yang menunjukkan manfaat dari penggunaan sistem absensi *online*, serta melalui motivasi dan insentif bagi pegawai untuk mengadopsi sistem baru. Ketiga, perbaikan struktur birokrasi dengan menyederhanakan SOP dan memastikan bahwa setiap pegawai memahami prosedur yang harus diikuti dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi. SOP yang jelas dan pelatihan yang memadai akan membantu meminimalisir kebingungan dan kesalahan dalam penggunaan sistem absensi *online*. Dengan mengatasi masalah-masalah ini, penerapan absensi *online* dapat lebih efektif, yang tidak hanya meningkatkan disiplin kerja tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen sumber daya manusia di sektor publik.

Referensi

- Abudin, D. (2024). The influence of the effectiveness the implementation of the presence administrative information system on work discipline and its impact on the quality employee service at sdn 160 sukalaksana bandung city. *Jasa (Jurnal Akuntansi Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 8(1), 233-247. <https://doi.org/10.36555/jasa.v8i1.2516>
- Adiwilaga, R. (2019). Disiplin pegawai sebagai upaya menekan patologi birokrasi di dinas binamarga sumber daya air dan pertambangan kabupaten bandung barat. *Journal of Government and Civil Society*, 3(2), 139. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v3i2.1995>
- Burhannudin, B., Zainul, M., & Harlie, M. (2019). Pengaruh disiplin kerja, lingkungan kerja, dan komitmen organisasional terhadap kinerja karyawan: studi pada rumah sakit islam banjarmasin. *Jurnal Maksipreneur Manajemen Koperasi Dan Entrepreneurship*, 8(2), 191. <https://doi.org/10.30588/jmp.v8i2.425>
- Darmawan, A. (2022). Pengaruh disiplin kerja dan motivasi aparatur sipil negara terhadap pelayanan publik. <https://doi.org/10.31219/osf.io/drmtb>

- Dj.B, Y., Sudirman, F. A., & R, L. O. M. (2024). Efektivitas Penerapan Aplikasi Online Single Submission dalam Pelayanan Izin Usaha Menengah Keatas di DPMPTSP Kabupaten Morowali. *PAMARENDA : Public Administration and Government Journal*, 4(1), 15–28. <https://doi.org/10.52423/pamarenda.v4i1.2>
- Edwards, George C, III. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington Dc : Texas A & M University . Congretional Quarterly Press
- Estiyanto, A. (2024). Penegakan sanksi disiplin berat terhadap pegawai negeri sipil di lingkungan kementerian perhubungan. *Iblam Law Review*, 4(2), 19-30. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.402>
- Hidayat, R., Irmayanti, A., & Setyawan, W. (2023). Prototype sistem manajemen absensi pegawai politeknik lamandau menggunakan teknologi rfid. *Smart Comp Jurnalnya Orang Pintar Komputer*, 12(3), 704-711. <https://doi.org/10.30591/smartcomp.v12i3.5283>
- Juniar, M. (2023). Pengaruh efektifitas aplikasi hrms terhadap absensi karyawan pada pt. thai seng indonesia menggunakan metode tam. *Jsitik Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi Komputer*, 2(1), 15-23. <https://doi.org/10.53624/jsitik.v2i1.283>
- Maulidya, N., Larassaty, A., & Pujianto, W. (2021). Pengaruh implementasi absensi fingerprint, sanksi, dan motivasi terhadap disiplin kerja karyawan di intako. *Greenomika*, 3(2), 81-89. <https://doi.org/10.55732/unu.gnk.2021.03.2.4>
- Putri, T. (2024). Perancangan sistem absensi berbasis web menggunakan kode barcode di pt azhan group. *Jati (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 8(3), 3143-3150. <https://doi.org/10.36040/jati.v8i3.9621>
- Ramdhani, A., Alamanda, D., Nurdiaman, A., & Arief, M. (2019). Problem arising from new technology on e-government, the use of hay.u application in bandung, indonesia. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 19(2), 149. <https://doi.org/10.25124/jmi.v19i2.1889>
- Saied, M. (2023). Perancangan dan implementasi sistem absensi berbasis teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan kehadiran karyawan dalam perusahaan. *JTI*, 2(3), 87-92. <https://doi.org/10.58860/jti.v2i3.21>
- Sofiana, E., Wahyuarini, T., & Novieyana, S. (2017). Pengaruh punishment terhadap disiplin mahasiswa (studi kasus pada program studi d-4 administrasi negara jurusan administrasi bisnis polnep). *Inovbiz Jurnal Inovasi Bisnis*, 5(2), 133. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v5i2.250>
- Utama, A. (2020). The implementation of e-government in indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478), 9(7), 190-196. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i7.929>
- Yusof, Y., Nasir, M., Othman, K., Suliman, S., Shahbudin, S., & Mohamad, R. (2018). Real-time internet based attendance using face recognition system. *International Journal of Engineering & Technology*, 7(3.15), 174. <https://doi.org/10.14419/ijet.v7i3.15.17524>